

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Rokan Hilir 13 Tahun 2007 fungsi menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

4.2 Kedudukan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

1. Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana unsur penunjang pemerintah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala badan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rokan Hilir untuk melaksanakan kewenangan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;

- b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- c. Pembinaan dan penyelenggaran tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana meliputi Pengarusutamaan Gender, Kualitas Hidup, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- d. Penyelenggaraan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya

4.4 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- 1. Kepala Badan
- 2. Sekretaris Badan membawahi
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Program
 - c. Sub Bagian Keuangan
- 3. Bidang Pengarusutamaan Gender membawahi
 - a. Sub Bidang Kebijakan Pengarusutamaan Gender
 - b. Sub Bidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
- 4. Bidang Keluarga Berencana membawahi
 - a. Sub Bidang Operasional KB/KR Operasional KS/PK
 - b. Sub Bidang Evaluasi, Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi KB
- 5. Bidang Keluarga Sejahtera membawahi
 - a. Sub Bidang Institusi, Advokasi dan KIE
 - b. Sub Bidang Pergerakan Masyarakat dan Pemberdayaan Keluarga
- 6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak membawahi

- a. Sub Bidang Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
- b. Sub Bidang Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Perempuan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

5.5 Visi dan Misi Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Agar pembangunan lima tahun ke depan tidak berjalan sendiri tanpa arah maka diperlukan satu arahan dan persamaan visi yang mengarah pada tindakan penuh kehati-hatian dan sikap arif dari semua pihak agar terjalin pembangunan terkoordinasi dan berdayaguna termasuk pembangunan yang dijalankan Badan pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan instansi lainnya.

Visi

ROKAN HILIR SEJAHTERA 2015

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa tujuan bersama antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Rokan Hilir yang ingin mewujudkan kondisi Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2015 yaitu kebutuhan dasar keluarga telah terpenuhi secara lahir dan batin yang diwujudkan melalui misi.

Misi

Memberdayakan Keluarga dalam rangka mewujudkan Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga

- a. Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - b) Menurunnya Proporsi Keluarga Miskin.
 - c) Peningkatan Kualitas SDM Keluarga Miskin dan terbukanya akses
 - d) kesempatan kerja serta modal kerja
 - e) Meningkatkan produktifitas keluarga miskin.
 - f) Tersedianya system informasi program (SIP) pengentasan kemiskinan.

- g) Terjadinya sinergi antar program dan kemitraan dalam usaha menanggulangi kemiskinan secara terpadu.
 - h) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan.
 - i) Meningkatkan kelembagaan Ekonomi Desa.
- b. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga
- a) Meningkatnya jumlah keluarga yang mempunyai kegiatan Ekonomi Produktif.
 - b) Meningkatnya partisipasi mitra usaha dalam kegiatan kelompok UPPKS.
 - c) Berkembangnya program penguatan modal usaha.
 - d) Meningkatnya penyerapan modal usaha oleh kelompok UPPKS
 - e) Meningkatnya partisipasi keluarga dalam Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).

Meningkatkan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi untuk mendukung kebijakan kependudukan.

- a. Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana
- b. Meningkatnya kelestarian kesertaan KB
- c. Meningkatnya Proporsi Keluarga Sejahtera yang menggunakan pelayanan mandiri.
- d. Meningkatnya usia kawin pertama wanita 21 tahun.
- e. Meningkatnya proporsi keluarga yang memahami tentang Kesehatan Reproduksi.
- f. Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana pelayanan Konseling Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. Meningkatnya partisipasi pria dalam program Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana.

- h. Meningkatnya komitmen politis untuk perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Misi II

- a. Penguatan dan Pemantapan Jaringan Kelembagaan
- b. Penguatan Kelembagaan Desa dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dan LSOM dalam Program Kesejahteraan Keluarga Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
- d. Tersedianya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, pedoman operasional tentang Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
- e. Meningkatnya kualitas SDM keluarga
- f. Meningkatnya partisipasi tenaga program dalam program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

Misi III

- a. Mendukung Kemitraan dalam rangka Pengembangan Jaringan Informasi Program Kesejahteraan Keluarga dan Keluarga Berencana
- b. Tersedianya data Keluarga Miskin, Keluarga Sejahtera, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.
- c. Mantapnya pengelolaan pelayanan informasi dan Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Kesejahteraan Keluarga, Ketahanan Keluarga dan Keluarga Berencana.

Disamping itu dari data yang saya dapatkan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Rokan Hilir yang mencapai angka 206.752 jiwa pada tahun 2010 dan angka ini meningkat dibandingkan pada tahun 2009. Sedangkan untuk Kecamatan Bangko, terjadi peningkatan jumlah pertumbuhan tetapi peningkatannya masih bisa dikatakan dapat dikendalikan sesuai

dengan data jumlah pertumbuhan penduduk lima tahun terakhir yang didapatkan. Pada tahun 2006 jumlah penduduk di Kecamatan Bangko mencapai 28.080 jiwa, jumlah ini mengalami peningkatan di tahun berikutnya menjadi 29.323 jiwa. Namun pada tahun 2008 jumlah pertumbuhan penduduknya mengalami penurunan yang tidak terlalu signifikan dan mencapai 29.100 jiwa, dan seiring berjalannya waktu jumlah penduduk di tahun berikutnya mulai mengalami peningkatan kembali menjadi 29.965 jiwa di tahun 2009 sedangkan untuk tahun 2010 sendiri jumlah penduduk yang ada di Kecamatan Bangko kembali mengalami peningkatan jumlah menjadi 30.508 jiwa yang selisihnya kurang lebih 543 jiwa dari tahun kemarin. Adanya peningkatan jumlah penduduk memacu keinginan pemerintah khususnya Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional untuk melakukan tindakan yang dapat mengontrol laju pertumbuhan penduduknya.

Analisis pelaksanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan koordinasi, perencanaan, pengendalian dan pelaksanaan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Untuk melaksanakan tugas badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Dalam rangka mesejahteraan keluarga badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan mempunyai peran sebagai berikut:

- a. Peremusan perencanaan, kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana
- b. Pemberian pembinaan dibidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana serta pelayanan umum,
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selain dari pada itu badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan juga mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. Patner kerja pemerintah daerah

- b. Mengadakan peranan aktif perempuan dan memperkecil ketertindasn perempuan.
- c. Memberikan wawasan tentang perempuan diberbagai aspek kehidupan:
 - 1. Rumah tangga
 - 2. Karier
 - 3. Gender
 - 4. KDRT (poligami,selingkuh,diperkecil)
- d. Memberikan pendidikan diberbagai bidang:
 - 1. Politik
 - 2. Kesehatan
 - 3. Ketenangan kerja perempuan.

5.6 Penduduk

Untuk melihat jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.1 :Data Jumlah Penduduk Bangko Tahun 2012

No	Tahun	Kecamatan	Kelurahan	KK	LK	PR
2	2012	Bangko	Bagan Jawa	1.392	3.353	3.238

Sumber: Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, 2012

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah KK di Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2011 adalah 1.192, jumlah laki-laki 3.120 dan jumlah perempuan 3.119. sedangkan pada tahun 2012 jumlah KK berjumlah 1.392, jumlah laki-laki 3.353 dan jumlah perempuan 3.238. Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan penduduk di Kepenghuluan Bagan Jawa menunjukkan adanya peningkatan.

5.7 Jumlah Angka Kematian dan Kelahiran

Untuk mengetahui jumlah angka kelahiran dan kematian di Kabupaten Rokan Hilir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Data Kelahiran dan Kematian Bayi Tahun 2012

Priode	Angka Kelahiran	Angka Kematian
Januari-Desember	1130	9

Sumber : Laporan gerakan sayang ibu Kabupaten Rokan Hilir, 2014

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Data kelahiran bayi dan data kematian berdasarkan Laporan gerakan sayang ibu kabupaten rokan hilir tahun 2012: Bulan Januari-Desember jumlah angka kelahiran bayi adalah: 1130 bayi dan jumlah kematian bayi 9 orang dalam jangka waktu 1 tahun.